



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PIDATO KETUA BPK RI

**DALAM ACARA
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BPK RI
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
(LKPP) TAHUN 2022
KEPADA DPR RI**

JAKARTA, 20 JUNI 2023



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
**Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita
semua,**

**Om Swastiasthu, Namó Buddhaya, Salam
Kebajikan.**

- **Yang Terhormat, Ketua DPR RI;**
- **Yang Terhormat, para Wakil Ketua DPR RI;**
- **Yang Terhormat, Wakil Ketua dan para
Anggota BPK RI;**
- **Yang Terhormat, para Anggota DPR RI; serta;**
- **Hadirin yang saya hormati.**

Perkenankan kami untuk mengawali sambutan ini dengan menghaturkan puji syukur kepada ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah menganugerahkan kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kami dapat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 sekaligus penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2022 (atau IHPS II 2022).

Pimpinan dan Anggota DPR, serta Hadirin yang kami muliakan,

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 *Unaudited* kepada BPK untuk diperiksa pada tanggal 24 Maret 2023.

Selanjutnya, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP tersebut, termasuk pemeriksaan 82 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2022 secara administratif telah disampaikan BPK kepada DPR, DPD, dan Presiden pada 31 Mei 2023.

Pimpinan dan Anggota DPR, serta Hadirin yang terhormat,

Hasil pemeriksaan 82 LKKL dan LKBUN menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 81 LKKL dan LKBUN. Satu LKKL, yakni Laporan Keuangan (LK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Berdasarkan opini atas LKKL dan LK BUN tersebut, termasuk opini WDP pada LK Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2022, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP Tahun 2022.

Pimpinan dan Anggota DPR, serta Hadirin yang kami hormati,

Untuk meningkatkan perbaikan tata kelola keuangan negara, hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (atau SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak berpengaruh material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2022 antara lain sebagai berikut.

1. Pengelolaan pendapatan, antara lain fasilitas dan insentif perpajakan yang belum memadai serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum sesuai ketentuan.

BPK merekomendasikan Pemerintah antara lain agar mengoptimalkan fungsi pengawasan atas pemanfaatan fasilitas dan insentif perpajakan.

2. Pengelolaan belanja, antara lain belanja transfer Dana Bagi Hasil secara nontunai belum memadai dan Belanja Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang belum sepenuhnya didukung kebijakan pelaksanaan dan anggaran.

BPK merekomendasikan Pemerintah antara lain agar melakukan evaluasi dan perbaikan formulasi penghitungan Dana Bagi Hasil yang akan disalurkan secara nontunai dan menetapkan kebijakan penyelesaian kewajiban Pemerintah atas pelaksanaan Program Subsidi Tambahan KUR.

3. Pengelolaan dan penyelesaian piutang negara yang belum optimal, belum memadai, dan belum sesuai ketentuan, terutama pada piutang negara dari proses likuidasi BUMN, piutang pajak, dan piutang bukan pajak.

BPK merekomendasikan Pemerintah antara lain agar mengamankan hak tagih piutang negara, memutakhirkan data piutang pajak, dan meningkatkan pengawasan maupun pengendalian piutang bukan pajak tersebut.

Selain itu, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBN Tahun 2022, BPK juga menyampaikan Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal yang secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria

transparansi fiskal berdasarkan praktik terbaik internasional.

Pimpinan dan Anggota DPR, serta Hadirin yang terhormat,

Pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan pula Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 atas 388 Laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri dari satu LHP Keuangan, 177 LHP Kinerja dan 210 LHP Dengan Tujuan Tertentu.

IHPS dimaksud memuat temuan-temuan pemeriksaan yang seluruhnya bernilai **Rp25,85 triliun**, dengan rincian temuan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp11,20 triliun serta temuan terkait ketidakpatuhan sebesar Rp14,65 triliun. Selain itu, IHPS tersebut juga mengungkapkan temuan terkait kelemahan sistem pengendalian intern.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp577,69 miliar.

Pimpinan dan Anggota DPR, serta Hadirin yang kami hormati,

IHPS II Tahun 2022 juga memuat hasil pemeriksaan atas dua prioritas nasional yakni penguatan infrastruktur serta penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Pemeriksaan dilakukan pada 29 instansi pemerintah pusat, 90 pemerintah daerah, dan empat BUMN.

Hasil Pemeriksaan atas penguatan infrastruktur menunjukkan permasalahan antara lain manajemen aset konsesi jalan tol masih belum memadai, diantaranya tanah seluas 87,90 juta m² pada 33 ruas jalan tol belum bersertifikat.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Pemerintah agar melakukan pendataan, inventarisasi ulang, dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol tersebut.

Selanjutnya, terkait hasil Pemeriksaan penguatan stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik terdapat permasalahan antara lain Penetapan Aksi Pencegahan Korupsi belum sepenuhnya didukung dengan data karakteristik risiko korupsi serta belum mengacu pada hasil atau kajian akademik.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Tim Nasional Pencegahan Korupsi untuk memerintahkan Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi **menyusun dan menetapkan pedoman dan prosedur operasional baku terkait dengan penyusunan aksi Pencegahan Korupsi** yang didukung oleh kajian, analisis risiko serta hubungan atau pentingnya aksi Pencegahan Korupsi yang diusulkan dalam mengatasi risiko korupsi.

Pimpinan dan Anggota DPR yang terhormat,

IHPS II Tahun 2022 juga memuat hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M yang menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diselesaikan, dapat memengaruhi efektivitas kinerja pelaksanaan ibadah haji antara lain:

(1) regulasi mengenai kuota haji belum mengatur jumlah kuota jemaah haji lanjut usia, pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) dan petugas haji daerah; serta

(2) perhitungan dan pendistribusian kuota haji ke provinsi dan kabupaten atau kota belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar:

(1) menetapkan peraturan jumlah kuota jemaah haji lanjut usia, pembimbing KBIHU dan petugas haji daerah, serta

(2) menghitung kuota per provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan atas pengelolaan penyertaan modal negara (atau PMN) di BUMN menyimpulkan bahwa pengelolaan PMN di BUMN tahun 2020 hingga semester I tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian, antara lain pekerjaan yang didanai dari tambahan PMN tahun 2015 dan 2016 pada **13 BUMN** hingga semester I tahun 2022 sebesar **Rp10,49 triliun**, belum dapat diselesaikan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar mereviu kembali penggunaan dana PMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati,

IHPS II Tahun 2022 juga mengungkapkan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK kepada entitas yang diperiksa dari tahun 2005 sampai dengan 2022, yakni sebanyak **77%** telah sesuai, **17%** belum sesuai, **5%** belum ditindaklanjuti, dan sebanyak **1%** tidak dapat ditindaklanjuti.

Secara kumulatif hingga 31 Desember 2022, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan sebesar **Rp136,03 triliun**.

Capaian ini merupakan manifestasi dari komitmen dan konsistensi pengawasan oleh DPR dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Selanjutnya, seluruh informasi lengkap dalam IHPS dan LHP BPK semester II Tahun 2022 ini dapat diakses melalui laman: ihps.bpk.go.id.

Pimpinan dan Para Anggota DPR, serta Hadirin yang berbahagia,

Pada momen istimewa ini, perkenankan kami, atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atas komitmen dan sinergi yang telah terangkai dengan harmonis hingga kini.

Kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi dan memberkahi seluruh langkah dan upaya kita dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Wabilahittaufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Om Shanti Shanti Shanti Om

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Ketua**

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.